

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR DI KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU

Oleh :

FALLENTINA HELIGA^{1*}

NIM. E1011171079

Yulius Yohanes^{2*}, Hairil Anwar *

Email : fallentina.heliga@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit yang terjalin antara perusahaan dan petani perkebunan dimana dengan adanya kemitraan usaha apakah dapat meningkatkan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya kelompok mitra yang mandiri maupun berdampak pada perubahan perekonomian bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan kemitraan usaha melalui pola-pola yaitu inti plasma, sub kontrak, dagang umum, dan keangenan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Adapun hasil dalam penelitian ini peneliti analisis menggunakan 4 variabel keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan kemitraan sudah disampaikan dengan baik namun kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi informasi kebijakan menjadikan kurang maksimalnya implementasi suatu kebijakan. Dalam sumber daya sudah terpenuhi baik itu SDM maupun ketersediaan peralatan dan anggaran namun kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan anggaran dan manajemen menjadikan kurang maksimal tercapainya tujuan kebijakan. Dalam sikap pelaksana, kurangnya perhatian perusahaan kepada petani plasma terutama dalam memberikan pemberdayaan kepada petani, perusahaan hanya berfokus pada hasil pengelolaan perkebunan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan tercapainya implementasi kebijakan kemitraan perkebunan kelapa sawit di PT GKM agar ditemukannya keseimbangan antara peningkatan penghasilan perkebunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya kepada petani plasma.

Kata kunci : implementasi, kemitraan, petani plasma, dan koperasi

IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP POLICY OF PT GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR OIL PALM PLANTATION IN SEKAYAM SUB- DISTRICT, SANGGAU REGENCY

by

FALLENTINA HELIGA^{1*}

Student Number: E1011171079

Yulius Yohanes^{2*}, Hairil Anwar^{2*}

Email : fallentina.heliga@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,
2. Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Oil Palm Plantation Partnership Policy between the company and the plantation farmers where the existence of a business partnership can increase income, improve the quality of resources for independent partner groups or have an impact on economic change for the community. The implementation of business partnerships is done through the following patterns, namely nucleus plasma, sub-contracts, general trading, and agency. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques were interviews, observations, and documentation. This study was analyzed using 4 variables of successful policy implementation, namely communication, resources, attitude of implementers, and bureaucratic structure. The results of the study showed that communication in the implementation of partnership policy has been conducted well but the lack of clarity and consistency in the communication of policy information has caused the implementation of a policy to be less optimal. In terms of resources, both human resources and the availability of equipment and budgets have been met; the lack of human resource capacity in budget management has made the achievement of policy objectives less optimal. In terms of the implementer's attitude, the company lacks attention to plasma farmers, especially in providing empowerment to farmers, in which the company only focuses on the results of plantation management. With this research, it is expected that the implementation of the oil palm plantation partnership policy at PT GKM will find a balance between increasing plantation income and community welfare, especially for plasma farmers.

Keywords: implementation, partnership, plasma farmers, and cooperative

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat perwujudan perekonomian nasional adalah dengan cara menyelenggarakan kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi. Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih aktif berperan bersama-sama dengan pengusaha besar, karena usaha kecil mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Perwujudan sebuah kemitraan yang baik atau tanggung jawab moral pengusaha dalam sebuah kemitraan adalah membimbing dan membina pengusaha mitrannya untuk mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Kabupaten Sanggau bercirikan masyarakat agraris yang dimana sumbangan terbesar perekonomiannya dari sektor pertanian. Pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Sanggau yaitu 30,88% terhadap perekonomian. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama perekonomian, tingginya dominasi sektor pertanian berasal dari subsektor perkebunan yang memberikan kontribusi berkisar 24-26%

merupakan bagian yang turut melengkapi dunia usaha nasional dan mempunyai eksistensi, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan perekonomian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kemitraan adalah kerja sama usaha antara perusahaan dengan kelompok mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan atas dasar prinsip saling memerlukan, pertahannya. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Sanggau secara keseluruhan. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat pada tahun 2021, daerah Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah atau kabupaten yang memiliki jumlah lahan perkebunan kelapa sawit

terbesar di provinsi Kalimantan Barat. Persentase luas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sanggau mencapai 149,864 Ha per tahun 2019. Sedangkan untuk produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 mencapai 198,778 per tahun. Jumlah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sanggau menurut data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Sanggau 2021, berjumlah 32 Perkebunan Kelapa Sawit dimana 13 Pabrik Kelapa Sawit tersebut tersebar di 15 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Sekayam.

Sebagian besar tanaman perkebunan yang ditemui di Kecamatan Sekayam adalah kelapa sawit dengan jumlah produksi pada tahun 2018 sebesar 75.639 ton dengan luas areal 25.831ha. PT. Global Kalimantan Makmur (GKM) merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang cukup besar di Kabupaten Sanggau yang berlokasi di Desa Sotok Kecamatan Sekayam. Perkebunan PT GKM tersebar pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sekayam, Kecamatan Noyan, dan Kecamatan Beduai dengan 8 lokasi desa.

PT. GKM sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit menjalin kemitraan dengan masyarakat

melalui Koperasi Perkebunan (KOPBUN) dengan Pola Inti Plasma. PT. GKM menjalin kemitraan dengan masyarakat bersama koperasi perkebunan yaitu koperasi Buah Buno dan Koperasi Lantah Lomur. Pola kemitraan yang terjalin antara PT. GKM dan koperasi-koperasi ini adalah pola inti plasma. Adapun pola kemitraan inti plasma yang dimaksud disini yakni perusahaan PT GKM sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yakni koperasi yang menjadi mitra dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Ketentuan tarif pajak diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).” Adapun besarnya pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Implementasi kebijakan kemitraan yang terjalin antara PT. GKM dengan koperasi perkebunan masih belum maksimal dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya orasi yang dilakukan koperasi perkebunan berupa tuntutan yang termuat dalam Indo Globe News diakses Rabu 3 Maret 2021, orasi tersebut

dilakukan koperasi perkebunan pada tanggal 26 Agustus 2020 di depan kantor pabrik PT. GKM ketiga koperasi mitra yaitu Koperasi Buah Buno, Lantah Lomur , dan Bepuloh Lomur melakukan aksi pemogokan serta dilakukan dengan ritual adat. Orasi tersebut dilakukan karena selama ini komunikasi antara koperasi sebagai mitra perusahaan dan perusahaan PT GKM tidak pernah adanya penyelesaian dan jawaban atas setiap permasalahannya. Permasalahan tersebut dinilai tidak dapat terselesaikan karena banyaknya kepentingan-kepentingan oknum tertentu sehingga dilakukannya orasi ini agar aspirasi-aspirasi dari koperasi perkebunan dapat ditindaklanjuti oleh PT GKM dan dapat dipertemukan jawaban atas permasalahannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasannya perusahaan belum memperhatikan sepenuhnya pelatihan rutin maupun kepentingan peningkatan kesejahteraan petani plasma. Pelatihan diberikan kepada petani plasma melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas dan instansi terkait di wilayah kabupaten yang memang memberikan pelatihan setiap tahunnya kepada masyarakat. Peningkatan kesejahteraan petani plasma terkesan sangat lambat sehingga koperasi perkebunan dituntut untuk lebih mandiri dalam peningkatan

kesejahteraan anggota plasma. Selama ini perusahaan hanya memperhatikan perkebunan inti saja terkadang juga perkebunan plasma mengalami penurunan dalam hasil perkebunan seakan terdapat perbedaan peningkatan perkebunan inti dan perkebunan plasma.

Dengan adanya permasalahan diatas dan dari berbagai data yang telah di kumpulkan, untuk itu dinilai perlu adanya penelitian yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Kalimantan Makmur di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini berusaha menganalisis apa penyebab Implementasi Kebijakan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Kalimantan Makmur di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau belum maksimal sehingga kesepakatan yang terjalin dapat saling menguntungkan dan dapat mensejahterakan petani plasma khususnya di Kecamatan Sekayam.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Kalimantan Makmur di

Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yakni sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi antara perusahaan PT GKM dengan koperasi perkebunan.
2. Kurangnya kemampuan Sumber daya manusia PT GKM dalam pelaksanaan kemitraan.
3. Adanya perjanjian kemitraan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan.

Kurangnya perhatian PT GKM pemberdayaan petani plasma..

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Kebijakan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Kalimantan Makmur Di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Sehingga diketahui apa saja yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Kemitraan belum berhasil.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang dan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apa penyebab Implementasi Kebijakan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Kalimantan Makmur Di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau belum berhasil ?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan Implementasi Kebijakan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Kalimantan Makmur Di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Diharapkan bahwa dengan adanya penelitian tentang implementasi kebijakan kemitraan ini dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sekayam.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menamban wawasan tentang ilmu administrasi publik khususnya kajian kebijakan publik untuk menjadi dasar pemikiran mempelajari teori dan bagaimana proses implementasi kebijakan pada praktek lapangan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah saran dan informasi bagi pemerintah maupun petani plasma dalam pelaksanaan kebijakan kemitraan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau agar menjadi lebih efektif kedepannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (Subarsono, 2005:2) adalah *Public policy is whatever governments choose to do or not to do* (Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Hinggis (dalam Harbani 2017:67), mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang

handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

Model Edward III (dalam widodo (2010) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*charity*), dan konsistensi (*consistency*). (widodo 2010)

1. Transmisi.

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementor) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik.

2. Kejelasan

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta

substansi dari kebijakan publik tersebut.

3. Dimensi Konsistensi

Menghendakik agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

1. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas.
2. Perintah.
3. Anjuran atasan atau pimpinan.

Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan. (Widodo, 2007).

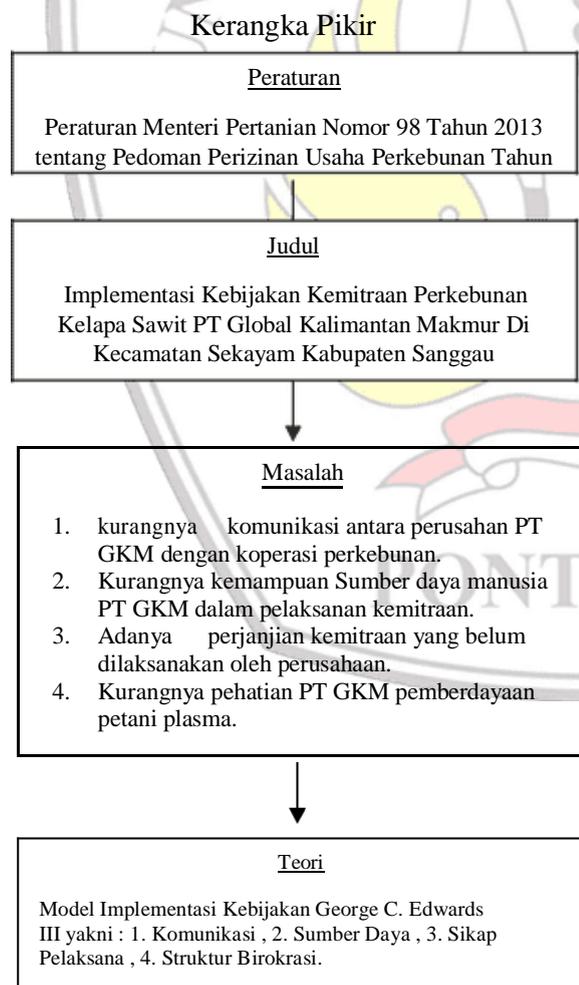
Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan menurut Van Mater & Van Horn,(1974:472) antara lain terdiri atas:

- a. pengetahuan (*cognition*)
- b. pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan
- c. arah respon mereka apakah menerima, netral, atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*)
- d. intensitas terhadap kebijakan

Menurut Edward III (1980:125), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti :

- a) struktur organisasi
- b) pembagian kewenangan
- c) hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan
- d) hubungan organisasi dengan organisasi luar

3. Alur Pikir Penelitian



↓

Output

Implementasi Kebijakan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT Global Kalimantan Makmur Di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sehingga terjalin kerjasama yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani plasma.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan kualitatif. Menurut Masri Singarimbun (1989) mengatakan bahwa: penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksonomik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Metode pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2009) adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi dan kehadirannya tidak berpengaruh dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Penelitian ini berlokasi di Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, tepatnya di PT. Global

Kalimantan Makmur. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena masih banyak permasalahan terkait kemitraan yang terjalin antara PT. GKM dan masyarakat sebagai mitra usaha, yang diantaranya; kurangnya komunikasi antara perusahaan PT GKM dengan koperasi perkebunan, kurangnya kemampuan Sumber daya manusia PT GKM dalam pelaksanaan kemitraan, adanya perjanjian kemitraan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan, kurangnya perhatian PT GKM pemberdayaan petani plasma.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan atau orang-orang dimana data yang akan diperoleh dan dokumen-dokumen tertentu yang dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti, penentuan informan dilakukan dengan purposive. Purposive menurut Sugiyono (2009) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau
2. Manajer dan staff PT Global Kalimantan Makmur (GKM)
3. Ketua koperasi Tuah Buno dan Lantah Lomour
4. Petani Plasma dan masyarakat di Wilayah Desa Sotok Kecamatan Sekayam.

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini maka peneliti menunjuk Camat Kecamatan Sekayam, Kepala Desa Sotok dan Pengurus adat wilayah Desa Sotok.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang dipaparkan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini terdiri dari empat variabel utama menurut Model Implementasi Kebijakan Edward III (dalam Jokowi (2010) bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik adalah dengan mengetahui informasi, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran, (*target group*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Kebijakan kemitraan sudah tersampaikan pada pelaksana kebijakan dan sampai pada kelompok sasaran yang berkepentingan di dalam implementasi

kebijakan kebijakan. Hal ini pula didukung dengan adanya Perda yang mengatur tentang kebijakan kemitraan di Kabupaten Sanggau. Kemitraan usaha didalam peraturan daerah kabupaten sanggau tertuang pada BAB V tentang kemitraan usaha perkebunan yang dimana bahwa kemitraan usaha dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, dan jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati. Peneliti juga mengamati terkait ketersediaan dokumen perjanjian kerjasama antara perusahaan dan koperasi perkebunan. Di dalam perjanjian tersebut berisikan hak-hak dan kewajiban baik perusahaan PT GKM maupun koperasi perkebunan.

Implementasi kebijakan kemitraan ini tidak sepenuhnya ke informasikan dengan baik terkait dengan tujuan adanya kebijakan kemitraan kepada beberapa pihak terkait yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan kemitraan ini kiranya dapat diketahui oleh banyak pihak untuk bentuk dan tujuan dari adanya kemitraan agar tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan . Komunikasi tentang adanya kebijakan kemitraan ini hanya diketahui secara detail oleh pihak-pihak tertentu saja seperti PT GKM dan Koperasi Perkebunan.

Namun maksud dan tujuan dari adanya kebijakan kemitraan usaha ini tidak disampaikan dengan baik. Dari hasil pengamatan peneliti kebijakan kemitraan lebih berfokus terhadap perkembangan pembangunan hasil perkebunan kelapa sawit saja namun tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya petani plasma.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa komunikasi yang kurang baik antara perusahaan dan koperasi mitra berpengaruh terhadap perkembangan kemitraan. Adanya peraturan perundang-undangan dan adanya dasar perjanjian kemitraan bukan menjadi keberhasilan penyampaian informasi kebijakan. Namun perlu adanya ketepatan dan kejelasan informasi kebijakan dan terjalannya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang bermitraa dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan kebijakan. Kurang baiknya komunikasi kedua belah pihak berakibatkan pada kurang tepatnya informasi dalam menjalankan suatu kebijakan.

2. Sumber Daya

Edward III (1980:11), menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terkait peralatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan kemitraan adalah semua peralatan cukup baik dan dapat berfungsi dengan baik. Baik itu kendaraan dan perumahan yang sangat baik untuk ditempatkan. Namun memang ada beberapa alat berat yang tidak dapat berfungsi lagi karena kerusakan, tetapi hal tersebut sudah diperbaharui kembali oleh pihak perusahaan sehingga mobilitas perkebunan dapat terpenuhi.

Pembiayaan dan keuangan sepenuhnya diatur oleh perusahaan melalui kredit pada Bank. Adapun pembiayaan tersebut berupa pendanaan pembangunan, perawatan, dan pengelolaan kebun plasma, dan infrastrukturnya termasuk sarana dan prasarana kebun. Kemudian pengembalian pinjaman tersebut dipotong melalui penjualan TBS kebun plasma. Namun di dalam implementasi kebijakan kemitraan ini terdapat kendala di dalam pengelolaan

keuangan terutama pada dana talangan. Kurangnya transparansi yang terjadi sehingga timbul asumsi-asumsi yang tidak baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aksi damai yang dilakukan pihak koperasi perkebunan terkait dana talangan yang semakin meningkat dan tidak selaras dengan perkembangan pembangunan perkebunan.

3. Sikap Pelaksana

Peneliti menganalisis bahwa koordinasi terkait arah dari adanya sikap pelaksana kebijakan kemitraan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan kemitraan. Namun sampai saat ini memang tidak adanya program khusus dari PT. GKM sendiri yang memberikan pemberdayaan pembangunan perkebunan terkait dengan pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk petani plasma dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan ini sifatnya hanya kondisional saja sedangkan di dalam Peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 9 tahun 2012 pada pasal 32 tentang kewajiban perusahaan perkebunan untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan teknis budidaya dan manajemen kepada para petani plasma. Hal tersebut juga selaras dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati kedua belah pihak. Namun hal tersebut peneliti amati bukan menjadi fokus utama dari

pihak perusahaan untuk memberikan pembinaan yang menjadi fokus perusahaan adalah terkait perkembangan perkebunan saja. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan asisten humas PT. GKM bahwasannya pembinaan tersebut dilakukan jika adanya permintaan dari pihak koperasi dan perusahaan tidak secara khusus memprogramkan pembinaan kepada koperasi perkebunan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa yang membidangi tugas dan fungsi pokok dalam implementasi kebijakan kemitraan di dalam perkebunan adalah bagian dari Humas. Perkembangan kemitraan baik dalam bentuk pengembangan perkebunan, kegiatan sosial, dan perawatan perkebunan kebun plasma sepenuhnya merupakan tanggungjawab humas. Melalui humas ini koperasi mitra dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi atau segala bentuk komunikasinya kepada perusahaan. Adapun kendalanya memang di dalam PT. GKM ini sudah terjadi pergantian manajemen yang mulanya itu merupakan manajemen dari PT. Djarum, kemudian PT. Providen Agro dan saat ini manajemen PT. HPI. Dari perpindahan manajemen inilah sebetulnya kendala setiap struktur

organisasi karena adanya perubahan kepemimpinan sehingga terkadang terjadi kurang pemahaman setiap karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Namun setiap karyawan sudah diberikan dan dijelaskan bagian dan tugasnya masing-masing sehingga adanya pergantian pimpinan ini pula bisa diatasi dengan berpedoman pada tugas dan fungsi pokok setiap bidangnya

E. PENUTUP

1. Simpulan

Setelah mendapatkan hasil penelitian dan melakukan pembahasan, adapun ditemukannya sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Komunikasi

Kebijakan kemitraan ini sudah jelas dalam penyampaian informasinya hal tersebut didukung dengan adanya peraturan menteri pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sampai kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan terkait kemitraan perkebunan dan hak dan kewajiban kemitraan juga sudah tertuang dalam Perjanjian Kemitraan antara PT GKM dan Koperasi Perkebunan. Namun kebijakan kemitraan ini sendiri belum jelas dan konsisten disampaikan

pada pelaksana kebijakan sehingga masih terdapat kendala dalam komunikasi tujuan kebijakan ini yang membuat kurang maksimalnya implementasi kebijakan kemitraan. Kurangnya komunikasi diantara pihak-pihak pelaksana kebijakan yang menjadikan tujuan kebijakan kemitraan tidak berjalan dengan maksimal.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kemitraan sudah cukup. Namun masih kurangnya pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini pula dibuktikan dengan kurangnya transparansi perusahaan terkait masalah biaya dana talangan yang menghambat pembangunan perkebunan. Dalam pembangunan dibutuhkan dana yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan perkebunan sehingga diperlukan transparansi terkait dana talangan sehingga tidak terjadi asumsi yang tidak baik terkait pembangunan perkebunan.

2. Sikap Pelaksana

Pemerintah daerah sangat mendukung penuh adanya kemitraan usaha perkebunan ini. Namun adanya kendala dalam sikap perusahaan dalam memberikan pembinaan bagi koperasi perkebunan kurang diperhatikan perusahaan. Adapun yang menjadi fokusnya adalah pembangunan perkebunan namun tidak

memperhatikan perkembangan pengetahuan dan pelatihan bagi koperasi perkebunan khususnya bagi kesejahteraan petani plasma.

3. Struktur Organisasi

Terlaksananya SOP dalam implementasi kebijakan kemitraan sudah sesuai dengan tugasnya masing. Setiap karyawan sudah memiliki SOP sendiri dalam menjalankan tugasnya. Namun karena adanya pergantian pimpinan yang baru namun tidak terbaharuinya perjanjian kemitraan dengan sistem kepemimpinan yang baru menjadikan kurang maksimalnya pelaksanaan tugas setiap karyawan harus beradaptasi kembali pada pola yang baru pula.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Adapun beberapa saran yang peneliti bisa berikan dalam implementasi kebijakan kemitraan perkebunan kelapa sawit PT. Global Kalimantan makmur di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut ini.

1. Komunikasi

Berkenaan dengan hal komunikasi ini lebih ditingkatkan kembali kejelasan tujuan dari adanya kebijakan kemitraan agar adapun hal hal permasalahan dapat terkomunikasikan dengan baik. Bentuk dari adanya komunikasi ini pula dapat

disampaikan dengan jelas tepat pada sasaran kebijakan agar adapun tujuan kebijakan dapat diimplementasikan dengan maksimal. Adanya pertemuan rutin yang membahas perkembangan kemitraan agar dapat menghasilkan komunikasi tujuan kemitraan.

2. Sumber Daya

Perlu adanya keterbukaan perusahaan terhadap dana talangan yang digunakan dalam perkembangan perkebunan agar tidak terjadi asumsi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ada baiknya bahwa dana talangan ini dibahas dan dilaporkan setiap bulannya sehingga dapat terkomunikasikan dengan baik.

3. Sikap Pelaksana

Keberhasilan kemitraan usaha kiranya dapat berdampak baik bagi masyarakat bukan hanya pada keuntungan yang didapatkan setiap perusahaan. Perlu adanya program-program dari perusahaan yang secara khusus dalam membina koperasi perkebunan agar dampak yang dirasakan tidak hanya hasil perkebunan namun peningkatan petani plasma dalam budidaya perkebunan kelapa sawit.

4. Struktur Organisasi

Perlu kerjasama dan peningkatan hubungan antar unit-unit organisasi agar tercapainya ketepatan sasaran dalam implementasi kebijakan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

F. REFERENSI

Sumber Buku :

- Agus, Erwan. 2012. Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media
- Arifin, Tahir. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah daerah. CV Alfabeta.
- Erwan, Dyah. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media.
- Hayat. 2018. Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Intra ns Publishing.
- Harbani, Pasolong. 2017. Teori Administrasi Publik, CV Alfabeta.
- Kurniawan, Hendra. 2008. Administrasi Publik-Teori dan aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mustafa, Delly H. 2014. Birokrasi Pemerintah. Bandung: Alfabeta.
- Moeleong, Lexy J. 2007. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pandji, Santosa. 2008. Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance, PT Refika Aditama.
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta CV.
- Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Sumber Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 20 pasal 1 ayat (13) Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

01/PERMENTAN/KB.120/1/2018
Tentang Pedoman Penetapan Harga
Pembelian Tandan Buah Segar
Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Peraturan Menteri pertanian nomor
940/kpts/OT.210/10/97 tentang
pedoman kemitraan usaha
pertanian.

Peraturan Menteri pertanian nomor
26/permentan/OT.140/2/2007
tentang pedoman prizinan usaha
perkebunan, kemitraan usaha.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 63 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan
Indeks K dan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar Produksi
Pekebun Kalimanta Barat.

Sumber Jurnal :

A.Rahman.2018. Identifikasi Faktor
Penentu Besaran Indeks “K” Dan
Kebijakan Penetapan Harga TBS
Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di
Kabupaten Muaro Jambi. Journsl
Of Agribusiness And Local
Wisdom. 1 No (1):87-99.

Syarah Naifuli, Ndan Imang, Firda
Juita.2017.Analisi Kemitraan
Petani Plasma Kelapa Sawit Pada Pt
CahayaAmugerah Plantation Di
Desa Puan Cepak Kecamatan
Muara Kaman Kabupaten Kutai
Kertanegara. Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman. Jurnal
Ekonomi Pertanian Dan
Pembangunan ISSN 1693-9646
Volume 14 No.1.

Ndan Imang. Siti Balkis, Maliki. 2016.
Analisis Implementasi Pola
Kemitraan Dan Pendapatan Petani
Plasma Kelapa Sawit Di Kecamatan
Bentian Besar Kabupaten Kutai
Barat Provinsi Kalimantan Timur.
Fakultas Pertanian Universitas
Mulawarman. Jurnal Pertanian
Terpadu 7(1):112-121.

Sumber lainnya :

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan
Barat “Kalbar.bps.go.id”

Dinas perkebunan provinsi Kalimantan
barat “disbun.kalbarprov.go.id”
SistemInformasi Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit Kabupaten Sanggau
“esawit.sanggau.go.id”